



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : S.R. EKO YUNianto
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 16749

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.090.046.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/85 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 403.950.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/128 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 657.038.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/47 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 345.020.000
4. Tanah Seluas 151 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 303.963.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/125 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.380.075.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 122.400.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 124.773.660

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.873.943.318

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 6.211.162.978

III. HUTANG

Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.211.162.978

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.